

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017 dan 2018

Yuliana Endah Widyaningsih

Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Wuku Astuti

Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Kristiana Sri Utami

Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 9, No. 1, Juni 2018

Halaman : 22 - 31

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

*Effectiveness, Contribution,
Projection, Local Revenue (PAD),
Regional Revenue*

JEL classifications :

Contact Author :

a. uwmyendah@yahoo.com

b. wukuastuti@gmail.com

c. utamisiswaya@yahoo.com

ABSTRACT

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengoptimalkan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, meskipun masih terdapat beberapa sumber penerimaan daerah yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi PAD Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan Daerah Sleman untuk periode 2012-2016 serta proyeksi PAD Kabupaten Sleman tahun 2017-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016. Proses pengolahan data menggunakan rumus analisis efektivitas, kontribusi dan trend dengan metode *Least Square*.

Independence of a region can be seen from the ability of the region to meet its own needs by optimizing the Regional Revenue. Local Revenue (PAD) in Sleman is one of the sources of local revenue, although there are still some other sources of revenue. The purpose of this study is to determine the effectiveness and contribution of PAD Sleman to Sleman Local Revenue for the period 2012-2016 and projected PAD Sleman in 2017-2018.

The method used in this research is quantitative. Data obtained from the Office of Revenue and Financial Management Sleman District Year 2012-2016. The process of data processing using the formula of analysis of effectiveness, contribution and trend with the Least Square method.

The results show that 1) The highest percentage of PAD effectiveness in 2013 is 150.55% and the lowest of 2014 is 104.35%. 2) The contribution of PAD to Regional Income in Sleman Regency is the largest in 2016 of 30.79% and the lowest of 2012 is 18.93% .3) The projection of PAD in 2017 is 809,970,380,800 and in 2018 is 947,199,851,200.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses kemajuan dan perbaikan yang secara terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Sedangkan Siagian (1994) memberikan pengertian pula bahwa pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Agar pembangunan terlaksana dengan lancar, tentunya pemerintah daerah harus mampu membiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semakin besar kebutuhan yang diperlukan maka semakin besar pula dana yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggali sumber pendapatan daerah lebih baik demi membiayai pembangunan tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim (2007:96) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tahun 2012-2016.

Tabel I.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan PAD Kabupaten Sleman

No.	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1.	2016	2,329,097,456,007	717,151,176,029
2.	2015	2,294,622,764,756	643,130,079,828
3.	2014	2,076,820,000,000	573,337,000,000
4.	2013	1,899,525,000,000	449,270,000,000
5.	2012	1,589,722,000,000	301,069,000,000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti analisis Efektivitas dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 serta proyeksi PAD tahun 2017 dan 2018.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman serta proyeksi terhadap PAD.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah, dimana pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber daya ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah. Sumber pendapatan daerah dalam undang-undang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Bagian laba usaha daerah
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Penerimaan yang sah.

Tabel 1. Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 (000.000)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2106
PAD	301.070,00	a) 449.270,00	573.338,00	643.130,08	717.151,176
Dana Perimbangan	1.281.708,00	992.782,00	1.499.148,00	1.052.113,63	1.321.660,505
Lain-lain penerimaan yg sah	6.945,00	457.473,00	4.334,00	599.379,06	290.285,775
Jumlah	b) 1.589.723,00	1.899.525,00	2.076.820,00	c) 2.294.623,31	d) 2.329.097,456

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sleman (data diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim (2007:96) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Propinsi
 - 1) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - b. Pajak Kabupaten/Kota
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
 - 7) Pajak Parkir
2. Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; tuntutan ganti rugi; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi; potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Efektivitas

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu rasio yang bisa digunakan adalah rasio efektivitas PAD. Handoko (2001:44) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Hidayat (1986) memberikan pengertian pula bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Menurut ahli Djumhana (2007:53) juga mendefinisikan efektifitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria pengukuran efektivitas

Persentase	Kriteria
(x>100%)	Efektif
(x=100%)	Efektifitas Berimbang
(X<100%)	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

Kontribusi

Handoko (2013:2) mendefinisikan kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi PAD suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari PAD terhadap Pendapatan Daerah, maka dibandingkan antara realisasi PAD terhadap Penerimaan Daerah. Rumus perhitungan kontribusi:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10	Sangat kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup sedang
41-50	Baik
Diatas 50	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Peramalan/Forecasting

Peramalan adalah penggunaan data atau informasi untuk menentukan kejadian pada masa depan, dalam bentuk perhitungan atau prakiraan dari data yang lalu dan informasi lainnya untuk penelitian terlebih dahulu prakiraannya (Ferdinan, 2011). Menurut Riduwan (2010:46), peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menentukan keputusan terbaik. Salah satu metode peramalan yang dapat digunakan adalah Metode *Least Square* (Dajan 2008:306).

$$Y' = a + bX$$

Dengan menggunakan kuadrat terkecil, nilai a dan b dari persamaan trend linier di atas ditentukan dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

keterangan:

Y' = taksiran nilai trend n = jumlah data

X = interval waktu $\sum XY$ = jmlh penerimaan dikali interval wkt

a = konstanta

b = besarnya perubahan Y oleh suatu perubahan X

$\sum Y$ = jumlah penerimaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Waktu pengumpulan hingga pengolahan data penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Agustus sampai dengan September 2017.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data penelitian yang digunakan adalah Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, yang bersumber dari data laporan anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah dan PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kabupaten Sleman. Variabel yang digunakan adalah variabel efektivitas pemungutan PAD dan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta proyeksi PAD. Efektivitas diukur dengan rasio efektivitas yaitu realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD. Kontribusi diukur dengan rasio kontribusi yaitu realisasi PAD dibagi dengan realisasi Pendapatan Daerah. proyeksi PAD dengan menggunakan metode analisis Least Square.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Tingkat Efektivitas PAD Sleman Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Target	Realisasi	Efektif (%)	Efektif
1.	2012	220.367.000.000	301.070.000.000	136,62%	Efektif
2.	2013	298.407.000.000	449.270.000.000	150,55%	Efektif
3.	2014	383.498.000.000	400.197.000.000	104,35%	Efektif
4.	2015	564.061.000.000	643.130.079.828	114,01%	Efektif
5.	2016	614.411.000.000	717.151.176.029	116,72%	Efektif

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah)

Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2016 sudah efektif. Tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Tahun 2013 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas PAD adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 150,55%. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan menurunnya tingkat efektivitas PAD tahun 2014 disebabkan karena pendapatan retribusi daerah di tahun 2014 tidak memenuhi target atau tidak maksimal.

Tabel 5. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

No.	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
1.	2012	301.070.000.000	1.589.723.000.000	18,93%	Kurang
2.	2013	449.270.000.000	1.899.526.000.000	23,65%	Sedang
3.	2014	573.338.000.000	2.076.820.000.000	27,60%	Sedang
4.	2015	643.130.079.828	2.294.622.764.756	28,03%	Sedang
5.	2016	717.151.176.029	2.329.097.456.007	30,79%	Sedang
Jumlah		2.683.959.255.857	10.189.789.210.763		

Sumber: Hasil Penelitian 2017(data diolah)

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terlihat pada tahun 2012 kontribusinya adalah yang terendah, yaitu sebesar 18,93% dan dalam kategori kurang. Pada tahun 2013-2016 kontribusi PAD masing-masing sebesar 23,5%; 27,6%; 28,03% dan 30,79% digolongkan dalam kategori sedang. Artinya Kabupaten Sleman perlu mengaktifkan pemungutan PAD sesuai potensi riil yang dihasilkan, sehingga bisa meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Tabel 6. Penghitungan Proyeksi

No.	Tahun	PAD (Y)	X	XY	X ²
1.	2012	301.070.000.000	-2	-602.140.000.000	4
2.	2013	449.270.000.000	-1	-449.270.000.000	1
3.	2014	400.197.000.000	0	0	0
4.	2015	643.130.079.828	1	643.130.079.828	1
5.	2016	717.151.176.029	2	1.434.302.352.000	4
Jumlah		2.510.818.255.857		1.026.022.432.000	10

$$a = \frac{2.510.818.255.857}{5} = 502.163.651.200$$

5

$$b = \frac{1.026.022.432.000}{10} = 102.602.243.200$$

10

$$Y(2017) = 502.163.651.200 + 102.602.243.200 (3)$$

$$= 809.970.380.800$$

$$Y(2018) = 502.163.651.200 + 102.602.243.200 (4)$$

$$= 912.572.624.000$$

Proyeksi pendapatan PAD pada Tahun 2017 dan 2018 dengan menggunakan metode Least Square sebesar 809.970.380.800 dan 912.572.624.000.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD Kabupaten Sleman memperlihatkan bahwa secara keseluruhan PAD tahun 2012-2016 sudah efektif karena realisasi PAD lebih besar dengan yang ditargetkan, artinya persentase tingkat efektivitasnya melebihi 100%. Tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Tahun 2013 merupakan tahun dimana persentase tingkat efektivitas PAD adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 150,55%. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan menurunnya tingkat efektivitas PAD tahun 2014 disebabkan karena pendapatan retribusi daerah di tahun 2014 tidak memenuhi apa yang sudah ditargetkan atau tidak maksimal.
2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang telah dilakukan secara keseluruhan, persentase kontribusi dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan tetapi klasifikasi kriteria kontribusi di tahun-tahun tersebut pada kondisi kurang dan sedang. Artinya realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman memberikan kontribusi kurang dari 31%. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman berasal dari Dana Perimbangan.

3. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2017 sebesar **809.970.380.800** dan 2018 sebesar **912.572.624.000**, artinya PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penyuluhan di bidang perpajakan oleh instansi yang terkait guna peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah supaya bisa meningkatkan efektivitas kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

REFERENSI

Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

——— (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Erlangga.

Dajan, A. (2008). *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta, LP3ES.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Handoko. (2001). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Erlangga.

——— . (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Djumhana, M. (2007). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ferdinand, A. (2011). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Indoprint.

Astuti, Wuku. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kab/Kota Pulau Jawa. *jurnal EBBANK*. Vol.6 no.1.